

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara salah satunya demokrasi dengan perwakilan rakyat yang represatif, melihat pada jaman yang mutakhir ini belum tentu dilaksanakannya pemerintahannya secara langsung. Demokrasi ini ialah system politik tentang aturan keikutsertaan rakyat dalam membuat suatu keutusan. Maka dari itu rakyat yang mengikutserta dalam pembuatan keputusan maka ada demokrasi. Sederhananya demokrasi yang berarti system pemerintahannya dengan keikutsertanya warga negara.

Pemilih pemula adalah pemilih yang baru pertama kali ikut memilih dalam pemilihan umum (Pemilu). Mereka baru akan merasakan pengalaman pertama kali untuk melakukan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Presiden- Wakil Presiden.<sup>1</sup>

Praktik demokrasi di Indonesia diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, ekonomi dan politik. Terwujudnya demokrasi dalam masyarakat tercermin dalam gotong royong. Pengenalan demokrasi telah berlangsung sejak awal kemerdekaan. Salah satu cara berdemokrasi negara tercermin dalam penyelenggaraan pemilu. Pemilu adalah perwujudan kedaulatan rakyat. Pemilu ini diadakan di Indonesia untuk menjaga kekuatan NKRN dan mewujudkan sarana demokrasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam Pasal 15 dinyatakan bahwa warga negara yang pada hari pemungutan suara telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak suara, dan untuk bisa menggunakan hak suara tersebut maka warga negara tersebut harus terdaftar sebagai pemilih seperti yang di tuliskan dalam pasal 16 ayat 1, dan pada ayat

---

<sup>1</sup> Andi Faisal Bakti dkk., eds. *Literasi Politik dan Konsolidasi Demokrasi*, (Jakarta: Churia Press, 2012). hlm127

berikutnya dikatakan bahwa pemilih yang dimaksud pada ayat 1 diatas nyata-nyata sedang tidak terganggu jiwa/ingatannya, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah berdomisili di daerah pemilihan tersebut sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, pada ayat 3 pasal 16 dikatakan bahwa seorang Warga Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 maka tidak dapat menggunakan hak suaranya.<sup>2</sup>

Keikutsertaan dalam pemilihan umum di Kota Cimahi dikarenakan untuk menentukan pemimpin yang dipilih dalam pemilihan umum akan menentukan nasib warga di lokasi yang mereka pilih, maka keikutsertaan dalam proses demokrasi atau pemilihan umum sangat penting. Masih banyak masyarakat yang tidak memilih atau tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum yang dikenal dengan golongan putih (golput) yang ditakuti pada saat pemilihan umum. Hal ini baik karena pengaruh rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang partisipasi politik atau tidak adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan KPU Kota Cimahi untuk menarik minat masyarakat untuk mengikuti pemilihan umum terutama pada pemilih pemula.

Pemilih yang belum berpengalaman tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum karena kurangnya sosialisasi. Pemilih yang berpartisipasi dalam kegiatan politik ini tetapi dibatasi karena mereka tidak mengetahui hak mereka untuk menyumbangkan suara mereka atau hak mereka untuk memilih dalam pemilihan dapat mengalami hal ini. Kejadian ini sangat mungkin terjadi pada pemilih pemula yang akan mengikuti pemilihan umum untuk pertama kali.

Untuk meningkatkan partisi Politik di Kota Cimahi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi, organisasi yang bertugas melaksanakan dan mensukseskan

<sup>2</sup> *Peraturan Pemerintah No 06 Tahun 2008 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*

Pilkada Kota Cimahi tahun 2019, memiliki tugas untuk meningkatkan keterlibatan politik di tingkat pemilih pemula di Kota Cimahi. Partai politik dan legislatif, selain KPU Kota Cimahi, memiliki peran dan kepentingan dalam mendorong partisipasi pemilih baru dalam rangka meningkatkan dukungan terhadap pemilihan umum dan mengoptimalkan pelaksanaan pemilihan umum bagi pemula di Kota Cimahi.

Hal-hal yang menjadi kekhawatiran tersebut harus diantisipasi agar tidak ada oknum, pihak, atau kelompok-kelompok yang memanfaatkan pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilihan DPRD Kota Cimahi. Tentunya hal-hal seperti ini yang harus diantisipasi oleh KPU Kota Cimahi agar terlaksana maksimalnya pemilihan DPRD Kota Cimahi. Tidak ada salahnya jika kita memperhatikan hingga ketinggian tersebut, karena pemilih pemula juga berhak menentukan siapa yang berhak memimpin Kota Cimahi selanjutnya.

Partisipasi politik pemilih pemula sangat menentukan kemenangan calon DPRD Kota Cimahi dalam pemilihan umum. Oleh karena itu disinilah peran partai politik dan calon DPRD Kota Cimahi dalam sosialisasinya untuk mencari dukungan dan meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum dan menggunakan hak politiknya dalam pemilihan DPRD Kota Cimahi tahun 2019.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan DPRD kota Cimahi Tahun 2019 sehingga dapat memberikan suatu pemahaman tentang tingkat partisipasi politik pemilih pemula di Kota Cimahi dan faktor apa saja yang mempengaruhi pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam pemilihan DPRD Kota Cimahi Tahun 2019 sehingga dapat membantu untuk menjelaskan mengenai masalah apa saja yang dihadapi pemilih pemula untuk ikut serta berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Pemilih pemula merupakan sasaran strategi politik, dan pada dasarnya, agar para pemilih baru ini dapat berpartisipasi aktif dalam politik, diperlukan proses pengembangan keterampilan mereka. Batasan usia pemilih dalam memilih pendatang baru adalah antara 17 hingga 21 tahun. Karena, tentu saja, anak berusia 17 tahun tidak memerlukan KTP.

Sehingga mempengaruhi kesadaran yang tinggi yang dapat menciptakan engagement yang tinggi dan sebaliknya. Kesadaran politik yang tinggi menyebabkan aktivitas yang tinggi dan sebaliknya. Alternatifnya, masyarakat ikut serta dalam pemilihan kepala daerah kota yang pasif. Komunitas ini dapat berpartisipasi jika menjanjikan atau menerima hal-hal materi, seperti kebutuhan materi/uang.

## Gambaran Umum Daerah Penelitian

### Letak Geografis Dan Luas Wilayah

Kelurahan Cibeber merupakan daerah yang berada di wilayah kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat . Kelurahan Cibeber memiliki luas wilayah 665,12 ha . Kelurahan Cibeber memiliki 14 RW dan 87 RT . Jarak tempuh dari kantor kelurahan ke kantor kecamatan kota Cimahi  $\pm$  2 km. Dari kantor kelurahan ke Kota Cimahi  $\pm$  4 km . Dari Kelurahan ke Pemerintahan Provinsi Jawa Barat  $\pm$  13 km. Potensi sumber daya Alam Kelurahan Cibeber memiliki potensi sumber daya alam hingga sumber daya manusia penjelasannya sebagai berikut. Luas wilayah tersebut terdiri dari:

Luas permukaan wilayah:

UIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
*Tabel 1 Luas Permukaan Wilayah*

<b>Luas</b>	<b>ha</b>
Luas wilayah	332,56 ha
Luas Permukaan	234,60 ha
Luas Kuburan	23,40 ha
Luas Pekarangan	30,06 ha
Luas Taman	18,40 ha

Luas Perkantran	2,50 ha
Luas Prasarana umum lainnya	23,60 ha

Sumber : Data statistik Kelurahan Cibeber

#### 4.1.2 Keadaan Demografis

Menurut Sumber data yang ada pada tahun 2019 terdapat 22.299 jiwa terdiri dari 11.201 orang laki laki dan 11.098 orang perempuan . Untuk mengetahui lebih jelas jumlah dihitung berdasarkan umur :

*Tabel 2 Jumlah penduduk kelurahan Cibeber berdasarkan umur*

<b>Kelompok Umur</b>	<b>Jumlah</b>
0-4 Tahun	1.310 Orang
5-9 Tahun	2.238 Orang
10-14 Tahun	2.063 Orang
15-19 Tahun	1.866 Orang
20-24 Tahun	1.832 Orang
25-29 Tahun	2.286 Orang
30-34 Tahun	2.279 Orang
35-39 Tahun	2.025 Orang
40-44 Tahun	1.837 Orang
45-49 Tahun	1.476 Orang
50-54 Tahun	1.059 Orang
55-59 Tahun	702Orang
60 > Tahun	1.325 Orang

Total	22.299 Orang
-------	--------------

Sumber : Data Statistik Kelurahan Cibeber

#### 4.1.3 Keadaan Sosial dan Budaya

##### 1. Mata Pencaharian

Masyarakat Kelurahan Cibeber mempunyai pekerjaan yang sangat beragam dimulai dari Buruh hingga pengusaha. Meskipun yang terbanyak mata pencaharian di Kelurahan Cibeber yaitu Karyawan Swasta . Berikut penjelasan tentang mata pencaharian masyarakat kelurahan Cibeber:

*Tabel 3 Daftar mata pencaharian masyarakat kelurahan Cibeber*

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Buruh	3.013 Orang
2	Karyawan Swasta	7.202 Orang
3	Karyawan BUMN/BUMD	213 Orang
4	Pegawai Negeri Sipil	3.028 Orang
5	Pengrajin	345 Orang
6	Pedagang	417 Orang
7	Penjahit	69 Orang
8	Tukang Batu	23 Orang
9	Tukang kayu	101 Orang

10	Wiraswasta	2.455 Orang
11	Montir	52 Orang
12	Dokter	3 Orang
13	Sopir	139 Orang
14	TNI/PORLI	359 Orang
15	Pengusaha	11 Orang
Jumlah	17.629 Orang	

Sumber : Data Statistik Kelurahan Cibeber

## 2. Agama

Mayoritas Penduduk Kelurahan Cibeber yaitu Islam akan tetapi ada juga beberapa orang yang beragama berbeda beda antara lain yaitu Kristen, Katolik , Budha dan Hindu

## 3. Pendidikan

Dari tingkat pendidikan masyarakat kelurahan Cibeber mayoritas terbanyak yaitu lulusan SLTA/Sederajat . Ini dilihat dari data statistik kelurahan Cibeber sebagian lainnya hanya tamatan Sekolah Dasar . Untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat kelurahan Cibeber bisa dilihat sebagai berikut:

*Tabel 4 Daftar Tingkat Pendidikan Masyarakat Kelurahan Cibeber*

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Usia 7-45 tahun tidak pernah sekolah	7 orang
2	Pernah Sekolah SD tapi tidak Tamat	1.797 orang

3	Tamat SD/Sederajat	4.526 orang
4	Tamat SLTP/Sederajat	4.005 orang
5	Tamat SLTA/Sederajat	5.657 orang
6	D-1	999 orang
7	D-2/D-3	1.295 orang
8	S-1	964 orang
9	S-2	64 orang
10	S-3	6 orang

Sumber: Data Statistik Kelurahan Cibeber

#### 5 Jumlah Pemilih pada Pemilihan DPRD Kota Cimahi 2019

Jumlah masyarakat kelurahan Cibeber yang terdata dalam pemilihan tetap pada pemilihan DPRD Kota Cimahi tahun 2019 berjumlah 14.656 . Dengan jumlah laki laki 7.450 dan Perempuan 7.206 orang.

Kelurahan Cibeber merupakan salah satu daerah yang menyelenggarakan pemilu serentak pada tahun 2019 data yang mengikut dari 22.299 penduduk warga Kelurahan Cibeber yang terdaftar mengikuti jumlah masyarakat kelurahan Cibeber yang terdata dalam pemilihan tetap pada pemilihan DPRD Kota Cimahi tahun 2019 berjumlah 14.656 . Dengan jumlah laki laki 7.450 dan Perempuan 7.206 orang. Perihal ini bisa dilihat dari pemungutan suara dari pemilih pemula yang ikut menyuarakan dan datang langsung ke TPS yang berada di Kelurahan Cibeber. Pada



tahun ini pun masyarakat lebih menurut tingkat pemilihannya dibanding periode sebelumnya.

Meningkatnya jumlah pemilih yang gagal menggunakan hak pilihnya konon disebabkan oleh fakta bahwa pemilih pemula bertanggung jawab untuk memilih pemilih baru yang baru saja mencapai usia pemilih dan biasanya tidak dapat membuat keputusan politik yang terinformasi. Agar pemilih baru dapat berpartisipasi dengan antusias dalam pemilihan umum, penting bagi pemerintah atau aktivis partai politik untuk mendidik mereka tentang politik. Penting untuk memahami persentase pemilih pemula karena mereka memiliki dampak yang signifikan terhadap pemilihan umum, bahkan jika mereka tidak memberikan suara pada pemilihan umum 2019. Pemilihan umum terbuka untuk partisipasi semua orang Indonesia.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum serentak sehingga dapat memberikan suatu pemahaman tentang tingkat partisipasi politik pemilih pemula apakah mengalami peningkatan atau penurunan dan faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum 2019 di Kelurahan Cibeber.

Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui bagaimana partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan DPRD kota Cimahi Tahun 2019 di Kelurahan Cibeber sehingga dapat memberikan suatu pemahaman tentang tingkat partisipasi politik pemilih pemula di Kota Cimahi dan faktor apa saja yang mempengaruhi pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam pemilihan DPRD Kota Cimahi Tahun 2019 di Kelurahan Cibeber sehingga dapat membantu untuk menjelaskan mengenai masalah apa saja yang dihadapi pemilih pemula untuk ikut serta berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Maka dari apa yang telah dipaparkan diatas terdapat berbagai keresahan yang di alami penulis dengan berbagai kajian yang ada dalam analisis dan berbagai media yang dijadikan sarana penulisan guna dibuatnya penelitian ini dalam judul : **“Partisipasi Politik Pemilih Pemula Terhadap Pemilihan DPRD Kota Cimahi 2019”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari hasil pemaparan diatas pun peneliti berusaha merumuskan fokus permasalahan secara komprehensif yaitu:

1. Adanya pemilihan DPRD Kota Cimahi 2019.
2. Partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan DPRD Kota Cimahi 2019.
3. Faktor partisipasi politik pada pemilihan DPRD Kota Cimahi 2019.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Sesuai dengan apa yang sudah dipaparkan didalam latar belakang masalah dan identifikasi dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan DPRD Kota Cimahi tahun 2019?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi pemilih pemula pada pelaksanaan pemilihan DPRD Kota Cimahi Kelurahan Cibeber?

## **1.4 Tujuan Masalah**

Secara pandangan luas, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui tingkatan partisipasi pemilih pemula pada pemilihan DPRD Kota Cimahi 2019, adapun tujuannya yaitu:

1. Untuk mengetahui partisipasi pemilih pemula pada pemilihan DPRD Kota Cimahi tahun 2019
2. Untuk mengetahui Faktor apa saja yang dialami pemilih pemula dalam pemilihan DPRD Kota Cimahi?

## **1.5 Manfaat Penelitian**

2. Kegunaan teoritis
  - a. Peneliti berharap bahwa penelitian ini mampu untuk bisa menjadi referensi dalam pengembangan Ilmu Politik, khususnya dalam kajian politik pada tingkat partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan DPRD.

- b. Peneliti pun berharap pada penelitian ini menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya berkaitan dengan pemilih pemula dan pemilihan DPRD.
3. Kegunaan Praktis
    - a. Hasil pada penelitian ini diharapkan untuk bisa memberikan sumbangan pengetahuan bagi ilmu sosial terkhusus mengenai pemilih pemula dalam pemilihan DPRD Kota Cimahi dan menambahkan koleksi pada perpustakaan yang dimana dapat dimanfaatkan sebagai referensi pada penelitian selanjutnya.
    - b. Hasil penelitian ini pun diharapkan dapat memberikan informasi pada masyarakat dalam memahami tingkat kesadaran pada pemilih pemula dalam pemilihan DPRD terkhususnya pada kalangan pemuda.

### **1.6 Kerangka Pemikiran**

Ada beberapa hal-hal pokok yang dijadikan landasan berfikir dalam penelitian ini, untuk memperjelas dan memfokuskan terhadap masalah dan topik yang hendak dikaji, adapun beberapa pengertian tentang permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti.

Menurut A.A Sahid Gatara Partisipasi politik dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif misalnya kegiatan mengajukan usul mengenai kebijakan umum, mengajukan kritik untuk perbaikan. Sedangkan partisipasi politik pasif contohnya adalah mentaati dan menerima kebijakan pemerintah.<sup>3</sup>

Teori-teori merupakan rangkaian konseptual dalam memberikan deskripsi terhadap persoalan yang sedang dikaji. Dinasti politik yang dimana suatu fenomena yang dikaitkan dengan pemegang kekuasaan kekeluargaan pada pemegang

---

<sup>3</sup> A. A Sahid Gatara . *Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan tahun* (Bandung; Pustaka Setia,2009) hlm 317

kekuasaan terdahulu dan digantikan dengan keluarga yang mempunyai hubungan seperti contohnya anak, istri, menantu dan lainnya.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka peneliti melakukan pengkajian melalui pendekatan secara teori. Pengumpulan data dan hasil penelitian mengenai permasalahan dari teori yang dipergunakan adalah melalui pendekatan keilmuan Ilmu Politik yang berkaitan dengan partisipasi pemilih pemula.

Pembahasan tentang partisipasi politik ialah persoalan menarik untuk dibahas karena partisipasi politi adalah kegiatan negara yang bentuk tindaknya sebagai pribadi yang mempengaruhi pembuatan keputusan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Dengan pemilihan kepala daerah setiap individu atau golongan masyarakat bisa mewujudkan kehendak masyarakat dengan sukarela tanpa pengaruh siapapun. Hal ini setiap masyarakat bisa secara langsung memberikan suara mereka dalam pemilihan secara aktif dalam menghadiri kegiatan politiknya, contohnya seperti kampanye.

Namun sikap serta perilaku masyarakat dalam partisipasi politik ada kalanya mengarah pada sikap yang apatis, sinisme hingga arogan yang menjadikan ini mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah yang pada akhirnya masyarakat tidak ingin memberikan suara dalam pemilihan dan juga menghadiri kegiatan politik/kampanye. Gejala ini sering muncul dimana-mana terlebih lagi pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Dari kerangka pemikiran yang dijabarkan secara tekstual, maka peneliti merumuskan anggapan dasar sebagai berikut:

Peneliti melihat bahwa adanya tingkatan partisipasi dari pemilih pemula dari adanya pemilihan DPRD yang dimana harus adanya pengkajian secara langsung agar mengetahui tingkat partisipasi apa yang terjadi pada pemilih pemula ini.

Gambar 1.1

